

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada awal tahun 2014. Keputusan ini terlihat tegas sebagai manifestasi dari komitmen Pemerintah Yogyakarta untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi setiap warganya serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti gelandangan dan pengemis. Kejengahan pemerintah dengan kehadiran gepeng yang membuat kota terlihat kumuh. Pemerintah Daerah tentu khawatir dimana Yogyakarta memiliki citra kota pariwisata akan rusak dan turis menjadi tidak nyaman untuk berwisata di kota Yogyakarta. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan surga bagi gepeng, hal itu membuat Pemerintah Daerah menjadi risih.

Keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan, terlebih di perkotaan. Percepatan pembangunan di perkotaan berbanding terbalik dengan keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan, sehingga masyarakat di desa memandang bahwa kehidupannya di perkotaan lebih terjamin jika mampu mengais rezeki di kota. Berkembangnya gelandangan dan pengemis menimbulkan keresahan akan gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada intinya juga mengganggu

stabilitas pembangunan. Diperlukan upaya-upaya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis tersebut. Munculnya gelandangan secara structural dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dari sistem kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan membentuk sendiri sistem kehidupan baru yang kelihatannya berbeda dari sistem kehidupan ekonomi kapitalis. Munculnya kaum gelandangan ini diakibatkan oleh pesatnya perkembangan kota yang terjadi secara parallel dengan tingginya laju urbanisasi (Sihombing, 2005 : 79).

Selama ini angka fertilitas atau tingkat kelahiran yang tinggi sering disalahkan sebagai penyebab utama kemiskinan. Padahal, banyak faktor lain yang menyebabkan kemiskinan masih saja menjadi masalah di kota Yogyakarta. Gelandangan dan pengemis masih banyak ditemui di jalanan kota Yogyakarta. Lapangan pekerjaan yang sempit dan memiliki sifat yang malas bekerja, menjadi alasan utama gelandangan dan pengemis.

Secara umum, kemiskinan gelandangan dan pengemis disebabkan oleh kurangnya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Kurang adanya kesempatan berusaha, minim informasi, kurang pengetahuan tentang teknologi yang semakin canggih serta gaya hidup yang boros, menyebabkan masyarakat miskin semakin lemah. Hal ini pula yang menyebabkan gelandangan dan pengemis masih sering kita jumpai di kota Yogyakarta.

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang umum terjadi dengan kehadiran gelandangan dan pengemis adalah adanya masalah ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Berkembangnya gelandangan dan pengemis dikhawatirkan akan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban seperti pencurian, perampokan dan berbagai macam kejahatan yang lainnya. Dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*" Tetapi pada kenyataannya pemerintah masih belum begitu mampu mensejahterakan masyarakatnya sehingga menimbulkan masalah sosial dengan adanya gelandangan dan pengemis yang mengakibatkan kurang ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kedatangan kaum gelandangan ini disebabkan karena tekanan pajak atau penyitaan tanah oleh negara di daerah asal kaum fakir dan terlantar tersebut. Kebiasaan para gelandangan menggembara, seperti sebagian masyarakat pada umumnya. Kebiasaan muncul dengan adanya urbanisasi dari berbagai daerah menuju kota Yogyakarta sebagai tempat bagi orang-orang yang mengadu nasib sebagai pendatang, banyaknya tekanan-tekanan yang dialami para gelandangan kenyataannya tidak langsung mengurangi jumlah gelandangan di Kota Yogyakarta (Twikromo, 1999 : 1)

Gelandangan dan pengemis memerlukan perbaikan mental khususnya jenis gelandangan psikotik yang mana kejiwaannya terganggu. Perbaikan bagi gelandangan dan pengemis yang sehat secara fisik dan kejiwaannya dapat dilakukan dengan cara *brainwashing* untuk membuka pemikiran dan merubah

pola pikir Gepeng yang semula “tangan di bawah” menjadi “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” sehingga mereka dapat menghentikan pencarian nafkah melalui kegiatan menggelandang dan mengemis lalu berganti dengan cara bekerja sesuai nilai-nilai dan norma. Perbaikan mental saja tidaklah cukup untuk membantu gelandangan agar dapat hidup dengan baik dan layak. Perbaikan mental harus disertai dengan pemberian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bersifat sepanjang hayat. Pendidikan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Pendidikan merupakan hak asasi seluruh manusia tak terkecuali bagi gelandangan dan pengemis (Rohmaniyati, 2016)

Berikut ini data gelandangan dan pengemis yang tersebar di Provinsi DIY dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2012**

<b>Data</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Gelandangan dan pengemis di DIY</b>	<b>800 jiwa</b>	<b>1.248 jiwa</b>	<b>515 jiwa</b>	<b>451 jiwa</b>	<b>274 jiwa</b>	<b>300 jiwa</b>

*Sumber data : <http://www.kompasiana.com>*

Kota Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa yang ada di Indonesia. Kota Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata dan beraneka ragam

budaya serta bangunan bersejarah yang sangat diminati baik wisatawan asing maupun dalam negeri. Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dengan memanfaatkan wisatawan yang ada di Kota Yogyakarta tidak berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Meskipun Kota Yogyakarta merupakan tempat wisata yang diminati, masyarakat masih banyak hidup dengan keterbatasan ekonomi, dan masih saja ada sebagian masyarakat memilih malas bekerja dan ingin mendapatkan penghasilan dari cara yang mudah menjadi gelandangan dan pengemis. Mengapa memilih Kota Yogyakarta sebagai obyek penelitian, karena dilihat masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih mudah dijumpai, hal ini yang membuat saya tertarik untuk membahas Kota Yogyakarta. Hal yang menarik lainnya adalah upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis tahun 2016/2017.

Dinas Sosial Yogyakarta bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Porles untuk mengevakuasi gelandangan dan pengemis yang ada di lapangan. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta akan menindak gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan bulan Ramadhan. Ratusan gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta berlomba-lomba untuk meminta-minta dan mengharap belas kasihan para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta saat bulan Ramadhan. Untung Sukaryadi, selaku kepala Dinsos DIY, mengatakan ada penambahan sekitar 100 gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadhan 2016. Kepala Satpol DIY, GBPH Yudhaningrat juga akan menguatkan personelnnya untuk

memantau gelandangan dan pengemis pendatang dari luar kota. Satpol PP DIY juga akan bekerjasama dengan Satpol PP di setiap kabupaten dan kota untuk menertibkan gelandangan dan pengemis tersebut di siangdanmalam ([tribunnews.com/regional/2016/06/14/satpol-pp-diy-akan-razia-gelandangan-dan-pengemis-siang-dan-malang](http://tribunnews.com/regional/2016/06/14/satpol-pp-diy-akan-razia-gelandangan-dan-pengemis-siang-dan-malang) 14 juni 2016 05.50 WIB)

Terjaringnya gelandangan dan pengemis ini, membuat Dinas Sosial DIY melakukan upaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan cara *Camp assessment* untuk dapat mengetahui letar belakang keluarga mereka, darimana mereka berasal, umur, motivasi dan latar belakang pendidikan. Gelandangan dan pengemis yang sudah berusia produktif akan dibekali dengan keterampilan, sedangkan yang masih di bawah umur akan dikembalikan ke rumah Perlindungan Sosial anak. Gelandangan dan pengemis yang sudah lanjut usia akan dimaksudkan ke panti wreda, sedangkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah, mereka akan di pulangkan ke asal daerah masing-masing (Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2014)

Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini akan menganalisis tentang Upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta tahun 2016/2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya Dinas Sosial DIY dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta 2016-2017 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Upaya Dinas Sosial DIY dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta tahun 2016/2017.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui Upaya Dinas Sosial DIY dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta tahun 2016/2017. Oleh karena itu, manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian ilmu pemerintahan tentang pemberdayaan gelandangan dan pengemis

##### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau evaluasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis, sehingga diharapkan dapat mengatasi kemiskinan .

### **1.4 Kerangka Dasar Teori**

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup berpindah di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 : 1).

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Tindakan menggelandangan dan mengemis adalah tindakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. (dalam KUHP pasal 504 dan 505).

Pemerintah juga menetapkan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut disamping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980).

Dalam satu dasawarsa terakhir ini perubahan penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, penambahan kesempatan kerja tidak sepesat pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat (Aswab, 1986:68).



## **1.4.1 Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis**

### 1.4.1.1 Definisi Pemberdayaan gelandangan dan pengemis

Gelandangan dan pengemis adalah masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan kesehatan dan digolongkan ke dalam kategori masyarakat miskin. Penanganan gelandangan dan pengemis memiliki strategi dalam hal itu, seperti penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat perlu diberikan program-program pelayanan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan.

Penanganan gelandangan dan pengemis tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja, karena sangat kompleksnya masalah dan faktor dapat menyebabkan gelandangan dan pengemis masih menjadi masalah saat ini. Menurut Suyono (dalam Anwas,2013 :84), penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak sekedar menyangkut pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal usaha atau tidak punya asset produksi, akan tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak mempunyai penyangga ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan berguna untuk menyadarkan individu dan masyarakat akan potensi, kebutuhan dan masalah yang ada di dalam diri sendiri dan lingkungannya. Dimulai dari saat ini perubahan harus

dilakukan, tidak perlu menunggu perintah, dari hal-hal yang kecil perubahan bisa dilakukan. Hal ini dilakukan oleh individu dan lingkungannya, guna untuk mendorong mereka melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya. Tahapan berikutnya adalah dengan penguatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, untuk perubahan yang akan meningkat. Melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan kegiatan ini dapat dilakukan. Individu atau masyarakat yang memiliki prestasi dalam perubahan dapat diberikan penghargaan. Perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup yang lebih baik merupakan sebuah keberhasilan proses. Semua tahapan ini penting untuk dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk motivasi bagi diri dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Mendekati masalah kemiskinan ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan, yaitu: perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif structural atau situasional (*situational perspective*). Menganalisis masalah kemiskinan memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri yang berbeda dari masing-masing perspektif. Tiga tingkat analisis yang dimiliki perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan ; individual, keluarga, masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut a strong *feeling of marginality* seperti sikap *parokial, apatisme, fatalisme* atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, jumlah anggota keluarga

yang besar ditandai dengan kemiskinan dan *free union or consensual marriages*. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan ditunjukkan oleh kaum miskin yang tidak terintegrasi dengan instansi-instansi masyarakat secara efektif. Hal ini seringkali diperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang diberi peluang untuk berkembang.

Dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern dapat dilihat dari masalah kemiskinan menurut perspektif situasional. Penetrasi kapital antara lain program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan permasalahan hasil pembangunan (Usman Sunyoto, 2012: 127-128)

Salah satu ciri gelandangan dan pengemis adalah ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan hanya mendapatkan penghasilan dari mengharapkan belas kasihan.

#### 1.4.1.2 Upaya Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis

Melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5p yaitu : pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Suharto dalam Anwas,2013:85-90). Penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pemukiman; pemukiman yang bersih dan sehat dapat menjadikan awal yang baik untuk dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki akal dan jasmani yang sehat.
- 2) Penguatan; pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka semakin diperkuat . Karena untuk menunjang kemandirian masyarakat serta kepercayaan diri masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan mereka.
- 3) Perlindungan; kelompok masyarakat yang lemah dilindungi agar tidak tertindas oleh kelompok masyarakat yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan guna untuk menghapus segala jenis diskriminasi maupun dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan; bimbingan dan dukungan terus diberikan agar masyarakat mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus menyokong masyarakat agar terus lebih maju dan semakin kuat untuk menghindari posisi yang semakin terjatuh dan lemah.
- 5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang baik agar tetap kekuasaan seimbang antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu memelihara

keselarasan dan tetap seimbang untuk memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

Masyarakat dalam kehidupan dan realitas sangat heterogen, karakter masyarakat yang beranekaragam akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilih teknik cara pelaksanaan pemberdayaan. Masyarakat memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Permasalahan serta kebutuhan yang ada di dalam masyarakat saling terkait. Pendekatan pembangunan sulit tercapai apabila dilakukan secara parsial. Sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, pembangunan dituntut untuk dikembangkan di berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat secara simultan dan kontinyu. Pembangunan itu sering disebut merupakan pendekatan holistik.

Pemberdayaan gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup dalam kekurangan yang menyebabkan menjadi tidak memiliki tempat tinggal serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut (Perda Daerah DIY No. 1 tahun 2014):

1. Upaya Preventif
  - a. Pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kerja
  - b. Peningkatan derajat kesehatan
  - c. Fasilitas tempat tinggal
  - d. Peningkatan pendidikan

- e. Penyuluhan dan edukasi masyarakat
  - f. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum
  - g. Bimbingan sosial
  - h. Bantuan sosial
2. Upaya Koersif
- a. Penertiban
  - b. Penjangkauan
  - c. Pembinaan di Panti Sosial
  - d. Pelimpahan
3. Upaya Rehabilitasi
- a. Motivasi dan diagnosa psikososial
  - b. Perawatan dan pengasuhan
  - c. Pelatihan vokasional
  - d. Bimbingan mental spiritual
  - e. Bimbingan fisik
  - f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
  - g. Pelayanan aksesibilitas
  - h. Bantuan dan asistensi sosial
  - i. Bimbingan resosialisasi
  - j. Bimbingan lanjut
  - k. Rujukan
4. Upaya Reintegrasi Sosial
- a. Bimbingan resosialisasi

- b. Koordinasi dengan pemerintahan kabupaten/kota
- c. Pemulangan
- d. Pembinaan lanjutan

### **1.5 Definisi Konseptual**

- 1.5.1 Upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dalam Perda DIY No. 1 tahun 2014 yaitu upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi, upaya reintegrasi sosial.
- 1.5.2 Pemberdayaan gelandangan dan pengemis adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan upaya untuk mendorong serta membangkitkan potensi yang dimiliki agar dapat memperbaiki keadaan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

### **1.6 Definisi Operasional**

- 1.6.1 Upaya preventif dalam melakukan pemberdayaan gelandangan dan pengemis
  - a. Penyuluhan, bimbingan latihan dan pendidikan gelandangan dan pengemis
  - b. Pemberian bantuan sosial untuk gelandangan dan pengemis
  - c. Pengawasan serta pembinaan lanjut gelandangan dan pengemis

1.6.2 Upaya koersif dalam melakukan pemberdayaan gelandangan dan pengemis

- a. Penertiban
- b. Penjangkauan
- c. Pembinaan
- d. Pelimpahan

1.6.3 Upaya Rehabilitasi

- a. Motivasi dan diagnosa psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut
- k. Rujukan

1.6.4 Upaya Reintegrasi Sosial

- a. Bimbingan resosialisasi
- b. Koordinasi dengan pemerintahan kabupaten/kota
- c. Pemulangan
- d. Pembinaan lanjutan



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini merupakan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell 2010)

### **1.7.2 Data**

Didalam penelitian yang diperoleh, peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber untuk menunjang hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut:

#### **1.7.2.1 Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti melalui studi lapangan (Djuandi dan Fauzan, 2012:165). Sifatnya sangat subyektif yang diperoleh penulis langsung dari responden atau informan yang sama sekali belum di olah. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

#### 1.7.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak ketiga yang diperoleh oleh penulis, sifatnya cenderung lebih obyektif diperoleh dari jurnal, skripsi, thesis, distertasi, dan karya ilmiah lainnya atau monografi daerah setempat. Data sekunder memiliki manfaat seperti lebih meminimalkan biaya dan waktu, memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi, dan menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer.

#### 1.7.3 Analisis

Unit analisis adalah objek analisis yang dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini menyusun kegiatan untuk mengumpulkan data dengan mengambil unit analisis yang telah digunakan. Penelitian ini bertemakan upaya dinas sosial DIY dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta tahun 2016/2017. Dalam menyusun data ini, peneliti melakukan wawancara dengan para anggota instansi terkait yaitu, kepala dinas sosial dan staff yang terkait agar mendapatkan data yang relevan untuk di analisis.

#### 1.7.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian untuk memperoleh data yang relevan, akan dijelaskan dalam pembahasan ini. Peneliti menggunakan beberapa cara yaitu :

#### 1.7.4.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (interviewe) sebagai pemberi pertanyaan dan diwawancarai (interviewe) sebagai penjawab dari pertanyaan yang ada. Menurut Lincoln dan Guba (1985:266) maksud diadakan wawancara antara lain; mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, dan kepedulian, merekontruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang. Memferivikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memferivikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (Suwandi dan Basrowi 2008:128).

No.	Nama	Instansi	Jumlah
1.	Nanik Trisna Jayanti	Ka.sie Rehabilitasi Sosial	1
2.	Hera wati	Pelaksana Kegiatan Panti Sosial	1
3.	Syafi'i	Staff UPT Panti Karya	1
4.	Saputro	Pendamping Pembantu Pelaksana Sosial	1

#### 1.7.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang penting dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lengkap dan relevan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. (Suwandi dan Basrowi 2008:158).

No	Nama Data	Metode
1.	LAKIP	Dokumentasi
2.	Tabel	Arsip Data Dinsos